

Nomor : 4730/D.2.1/02/2025 28 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemantauan dan Evaluasi Pengumuman RUP Pada Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan Nomenklatur

Yth. **1. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)**
2. Administrator Pengelola Aplikasi SIRUP
3. Seluruh Pengguna Aplikasi SIRUP
Pada Kementerian/Lembaga

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data pengadaan nasional, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara digital, melakukan pemantauan terhadap kinerja perencanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga (K/L) melalui pengumuman RUP-SIRUP. Berdasarkan data tarikan SIRUP per awal Februari 2025, berikut hasil pemantauan yang kami lakukan:

- Sebanyak 7 K/L telah mengumumkan RUP pada akun SIRUP baru (akun yang sesuai dengan nomenklatur yang berlaku).
- Sebanyak 10 K/L masih menggunakan akun SIRUP lama (akun dengan nomenklatur sebelum perubahan).
- Sebanyak 7 K/L masih mengumumkan RUP pada akun SIRUP baru dan lama secara bersamaan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami mendorong seluruh K/L terutama yang mengalami perubahan nomenklatur agar melakukan penataan dalam pengumuman RUP sesuai dengan nomenklatur (baru) yang berlaku. Untuk itu setiap K/L diharapkan agar menindaklanjuti hal-hal berikut:

- Bagi K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, wajib mengumumkan RUP hanya pada akun baru sebagaimana telah disediakan pada aplikasi SIRUP. Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, cukup mengumumkan RUP pada akun SIRUP baru yaitu akun Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- Bagi K/L yang baru terbentuk atau merupakan pecahan dari K/L sebelumnya, harap segera mengumumkan RUP pada akun SIRUP baru yang telah disediakan.
- Bagi K/L yang masih mengumumkan RUP pada akun SIRUP lama serta K/L yang mengumumkan RUP pada dua akun (lama dan baru), harap segera melakukan migrasi data RUP yang telah terumumkan di akun lama ke dalam akun baru agar seluruh RUP terumumkan dapat terekapitulasi dalam satu akun K/L nomenklatur yang baru.
- Guna mendukung proses migrasi data bagi K/L yang sudah mengumumkan RUP pada akun SIRUP dengan nomenklatur lama, diharapkan agar K/L yang dimaksud segera menyampaikan surat permohonan migrasi data SIRUP Tahun Anggaran (TA) 2025 yang ditujukan kepada



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 0HcFhl
Nomor Tiket : SK202502280004

Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP. Penyampaian surat melalui tautan: eoffice.lkpp.go.id/persuratan.

5. Surat permohonan migrasi data RUP TA 2025 sudah meliputi seluruh satuan kerja di setiap K/L. Permohonan tidak disampaikan secara masing-masing oleh setiap satuan kerja namun dikoordinasikan oleh UKPBJ pada masing-masing K/L.

Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan Transformasi,
Pemantauan, dan Evaluasi
Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Fadli Arif

Tembusan :

1. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
3. Inspektorat Kementerian/Lembaga



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 0HcFhl

Nomor Tiket : SK202502280004

LAMPIRAN

Rekapitulasi Kementerian/Lembaga dengan Perubahan Nomenklatur

No.	Nama Kementerian/Lembaga TA 2024	Nama Kementerian/Lembaga TA 2025	Jenis Kementerian/Lembaga TA 2025	Status Pengumuman RUP	Keterangan
1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
2	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BPPMI	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Badan Pertindungan Pekerja Migran Indonesia)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
3	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Digital	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di dua akun (Kementerian Komunikasi Dan Informatika; dan Kementerian Komunikasi dan Digital)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
5	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian	Sudah mengumumkan RUP di akun yang benar	-
6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Transmigrasi	Kementerian	Sudah mengumumkan RUP di akun yang benar	-
7		Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian	Sudah mengumumkan RUP di akun yang benar	-
8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di dua akun (Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
9		Kementerian Pariwisata	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di dua akun (Kementerian Pariwisata; dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
10	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Kementerian	Sudah mengumumkan RUP di akun yang benar	-
11		Kementerian Hak Asasi Manusia	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Kementerian Hukum dan HAM)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
12		Kementerian Hukum	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Kementerian Hukum dan HAM)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
13	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Kebudayaan	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
14		Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
15		Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
16	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	Kementerian	Belum mengumumkan RUP	Umumkan RUP di akun baru
17		Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Kementerian	Belum mengumumkan RUP	Umumkan RUP di akun baru
18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di dua akun (Kementerian Koperasi; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
19		Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di dua akun (Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
20	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di dua akun (Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
21		Kementerian Kehutanan	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di dua akun (Kementerian Kehutanan; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
22	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
23		Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian	Masih mengumumkan RUP di akun lama (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Pindahkan dan umumkan RUP di akun baru
24	-	Badan Gizi Nasional	Lembaga	Sudah mengumumkan RUP di akun yang benar	-
25	-	Badan Penyelenggara Haji	Lembaga	Belum mengumumkan RUP	Umumkan RUP di akun baru
26	-	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Lembaga	Belum mengumumkan RUP	Umumkan RUP di akun baru
27	-	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Kementerian	Sudah mengumumkan RUP di akun yang benar	-
28	-	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kementerian	Sudah mengumumkan RUP di akun yang benar	-



Catatan:

Asumsi pada kolom *Status Pengumuman RUP* :

1. Untuk kementerian yang dipecah menjadi dua kementerian:

Jika pada akun lama masih terdapat paket yang diumumkan, maka

- i. akun baru yang belum mengumumkan RUP dianggap masih mengumumkan RUP di akun lama;
- ii. akun baru yang sudah mengumumkan RUP dianggap masih mengumumkan RUP di dua akun, baik akun lama maupun akun baru.

2. Untuk kementerian yang dipecah menjadi tiga kementerian:

Jika pada akun lama masih terdapat paket yang diumumkan, maka

- i. akun baru yang belum mengumumkan RUP dianggap masih mengumumkan RUP di akun lama;
- ii. akun baru yang sudah mengumumkan RUP dianggap sudah mengumumkan RUP di akun yang benar (akun baru).

Nomor : 4744/D.2.1/02/2025 28 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Monitoring Evaluasi Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dan Pemda Tahun Anggaran 2025 melalui SIRUP

Yth. **1. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)**
2. Administrator Pengelola Aplikasi SIRUP
3. Seluruh Pengguna Aplikasi SIRUP
Pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) menjadi media bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan barang/jasanya melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil *monitoring* pengumuman RUP per tanggal 17 Februari 2025 diketahui bahwa:

- Total RUP yang diumumkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda) pada aplikasi SIRUP sebesar Rp576,83 triliun atau mencapai 46,63% dari nilai pagu belanja pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.236,97 triliun.
- Terdapat 17 Kementerian, 4 Lembaga (berbentuk Badan), dan 42 Pemda (2 Provinsi, 3 Kota, dan 37 Kabupaten) yang belum mengumumkan RUP pada SIRUP atau sebesar 0% sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- K/L dan Pemda yang sudah mengumumkan RUP lebih dari 70% mencapai 15 K/L dan 155 Pemda dari total 657 K/L dan Pemda. Namun, masih terdapat K/L dan Pemda yang mengumumkan RUP melebihi nilai pagu belanjanya atau lebih dari 100%

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami mengharapkan setiap K/L dan Pemda agar:

- Segara menindaklanjuti surat kami sebelumnya nomor: 4627/D.2.1/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 hal upaya optimalisasi kinerja perencanaan PBJ tahun anggaran 2025 sebagai salah satu komponen penilaian ITKP.
- K/L dan Pemda terus mendorong seluruh satuan kerjanya untuk mengumumkan rencana belanja pengadaan barang/jasanya dalam bentuk RUP sebelum tanggal 31 Maret 2025 melalui aplikasi SIRUP. Hal tersebut juga berkontribusi untuk mendukung optimalisasi nilai ITKP Tahun 2025 untuk indikator SIRUP.
- K/L dan Pemda juga perlu mendorong satuan kerjanya untuk melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa dengan baik dan tepat, khususnya dalam memetakan dan mengidentifikasi belanja kegiatan yang dapat dikategorikan ke dalam belanja pengadaan barang/jasa untuk diumumkan RUP-nya melalui SIRUP. Hal ini untuk mencegah persentase pengumuman RUP yang melebihi 100% atau di atas nilai belanja pengadaannya sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan melalui RUP.
- Terkait dengan nilai pagu belanja pengadaan, K/L dan Pemda perlu melakukan sinkronisasi dan validasi data nilai pagu belanja pengadaannya. Klarifikasi tersebut akan kami gunakan untuk memperbaiki estimasi/perkiraan nilai pagu belanja pengadaan yang saat ini digunakan sebagai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : YMcQE1
Nomor Tiket : SK202502280006

data acuan pada *monitoring* sebagaimana disebutkan pada poin a. Klarifikasi juga menjadi penting agar perhitungan persentase pengumuman RUP tidak melebihi 100%.

Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan Transformasi,
Pemantauan, dan Evaluasi
Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Fadli Arif

Tembusan :

1. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Inspektorat Kementerian/Lembaga
5. Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : YMcQE1

Nomor Tiket : SK202502280006

LAMPIRAN 1: Data Persentase Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga TA 2025 per 17 Februari 2025
Kementerian/Lembaga dengan Persentase Pengumuman RUP < 50%

No.	Nama Kementerian/Lembaga	Jenis K/L	Belanja Barang/Jasa	Total Pengumuman RUP	% Pengumuman RUP terhadap Belanja Pengadaan
1	Kementerian Hak Asasi Manusia	KEMENTERIAN	120.91	-	0.00%
2	Kementerian Hukum	KEMENTERIAN	3,016.19	-	0.00%
3	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	KEMENTERIAN	429.59	-	0.00%
4	Kementerian Kebudayaan	KEMENTERIAN	1,998.42	-	0.00%
5	Kementerian Kehutanan	KEMENTERIAN	2,902.08	-	0.00%
6	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	KEMENTERIAN	1,374.27	-	0.00%
7	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	KEMENTERIAN	8.73	-	0.00%
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	KEMENTERIAN	173.32	-	0.00%
9	Kementerian Pekerjaan Umum	KEMENTERIAN	107,599.96	-	0.00%
10	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BPPMI	KEMENTERIAN	304.00	-	0.00%
11	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	KEMENTERIAN	10,761.08	-	0.00%
12	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	KEMENTERIAN	41,464.09	-	0.00%
13	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	KEMENTERIAN	5,051.52	-	0.00%
14	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	KEMENTERIAN	158.28	-	0.00%
15	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	KEMENTERIAN	82.07	-	0.00%
16	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	KEMENTERIAN	182.04	-	0.00%
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KEMENTERIAN	852.28	-	0.00%
18	Badan Intelijen Negara	LEMBAGA	6,095.65	-	0.00%
19	Badan Penyelenggara Haji	LEMBAGA	125.98	-	0.00%
20	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	LEMBAGA	416.50	-	0.00%
21	Badan Gizi Nasional	LEMBAGA	67,474.70	0.02	0.00%
22	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	KEMENTERIAN	7,150.58	11.46	0.16%
23	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	KEMENTERIAN	770.08	3.38	0.44%
24	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	KEMENTERIAN	1,941.27	21.80	1.12%
25	Kementerian Koperasi	KEMENTERIAN	473.31	11.86	2.51%
26	Kementerian Transmigrasi	KEMENTERIAN	82.07	2.16	2.64%
27	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	KEMENTERIAN	2,191.86	61.92	2.83%
28	Badan Standardisasi Nasional	LEMBAGA	131.22	3.86	2.94%
29	Dewan Perwakilan Daerah	LEMBAGA	861.78	30.32	3.52%
30	Badan Siber dan Sandi Negara	LEMBAGA	1,052.81	65.52	6.22%
31	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	KEMENTERIAN	259.95	18.51	7.12%
32	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	LEMBAGA	94.36	6.90	7.32%
33	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	LEMBAGA	297.26	22.91	7.71%
34	Badan Ekonomi Kreatif	KEMENTERIAN	149.61	11.67	7.80%
35	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	LEMBAGA	222.16	18.93	8.52%
36	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KEMENTERIAN	3,672.16	329.93	8.98%
37	Kementerian Luar Negeri	KEMENTERIAN	6,141.16	558.42	9.09%
38	Kementerian Pariwisata	KEMENTERIAN	1,176.49	111.77	9.50%
39	Dewan Ketahanan Nasional	LEMBAGA	25.45	2.77	10.90%
40	Ombudsman Republik Indonesia	LEMBAGA	139.47	15.52	11.13%
41	Majelis Permusyawaratan Rakyat	LEMBAGA	849.22	100.96	11.89%
42	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	KEMENTERIAN	38.07	4.54	11.93%
43	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	KEMENTERIAN	378.97	46.15	12.18%
44	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	LEMBAGA	53.49	6.55	12.25%
45	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	LEMBAGA	566.66	70.27	12.40%
46	Kementerian Sosial	KEMENTERIAN	3,755.43	479.23	12.76%
47	Kementerian Komunikasi dan Digital	KEMENTERIAN	7,150.58	938.77	13.13%
48	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	LEMBAGA	304.00	45.22	14.88%

No.	Nama Kementerian/Lembaga	Jenis K/L	Belanja Barang/Jasa	Total Pengumuman RUP	% Pengumuman RUP terhadap Belanja Pengadaan
49	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	KEMENTERIAN	158.28	23.76	15.01%
50	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	KEMENTERIAN	54,223.59	8,838.71	16.30%
51	Badan Riset dan Inovasi Nasional	LEMBAGA	2,846.44	623.32	21.90%
52	Arsip Nasional Republik Indonesia	LEMBAGA	164.97	38.32	23.23%
53	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KEMENTERIAN	112,651.48	27,533.30	24.44%
54	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	KEMENTERIAN	1,679.89	415.76	24.75%
55	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia	LEMBAGA	188.88	47.98	25.40%
56	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	LEMBAGA	1,211.17	334.36	27.61%
57	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	KEMENTERIAN	12,642.08	3,501.84	27.70%
58	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	LEMBAGA	1,069.35	297.48	27.82%
59	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	KEMENTERIAN	94.23	27.32	29.00%
60	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal	KEMENTERIAN	429.59	128.88	30.00%
61	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	LEMBAGA	1,992.73	603.23	30.27%
62	Lembaga Administrasi Negara	LEMBAGA	169.36	52.03	30.72%
63	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	KEMENTERIAN	329.90	101.89	30.88%
64	Badan Pusat Statistik	LEMBAGA	2,900.14	910.21	31.39%
65	Dewan Perwakilan Rakyat	LEMBAGA	1,142.21	390.98	34.23%
66	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	KEMENTERIAN	2,926.04	1,088.00	37.18%
67	Kementerian Pertahanan	KEMENTERIAN	111,529.91	41,601.69	37.30%
68	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	LEMBAGA	563.45	219.11	38.89%
69	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	LEMBAGA	75.62	30.27	40.04%
70	Komisi Pemilihan Umum	LEMBAGA	1,514.67	617.82	40.79%
71	Komisi Yudisial RI	LEMBAGA	139.83	57.66	41.24%
72	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	LEMBAGA	58.47	24.44	41.80%
73	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	LEMBAGA	1,374.27	576.08	41.92%
74	Badan Pengawas Pemilihan Umum	LEMBAGA	1,562.86	688.00	44.02%
75	Badan Kepegawaian Negara	LEMBAGA	382.93	171.45	44.77%
76	Badan Karantina Indonesia	LEMBAGA	687.82	307.99	44.78%
77	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	KEMENTERIAN	83.28	37.81	45.41%
78	Kementerian Sekretariat Negara	KEMENTERIAN	1,911.33	871.07	45.57%
79	Kementerian Perindustrian	KEMENTERIAN	1,617.04	748.76	46.30%
80	Kementerian Perhubungan	KEMENTERIAN	26,687.19	12,385.15	46.41%
81	Badan Pangan Nasional	LEMBAGA	267.70	124.63	46.55%
82	Kejaksaan Republik Indonesia	LEMBAGA	18,636.41	8,771.32	47.07%
83	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN	4,193.02	1,977.58	47.16%
84	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	KEMENTERIAN	9,504.99	4,568.73	48.07%
85	Mahkamah Agung	LEMBAGA	4,265.07	2,091.44	49.04%
86	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	KEMENTERIAN	149.61	74.02	49.48%

Kementerian/Lembaga dengan Persentase Pengumuman RUP 50 - 70%

No.	Nama Kementerian/Lembaga	Jenis K/L	Belanja Barang/Jasa	Total Pengumuman RUP	% Pengumuman RUP terhadap Belanja Pengadaan
87	Badan Informasi Geospasial	LEMBAGA	250.74	142.42	56.80%
88	Lembaga Ketahanan Nasional	LEMBAGA	99.58	56.80	57.04%
89	Kementerian Pertanian	KEMENTERIAN	27,751.47	15,943.27	57.45%
90	Kementerian Perdagangan	KEMENTERIAN	1,159.24	678.79	58.55%
91	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	LEMBAGA	1,979.65	1,162.75	58.74%
92	Kementerian Agama	KEMENTERIAN	29,351.51	17,376.42	59.20%
93	Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)	LEMBAGA	6,195.55	3,819.10	61.64%
94	Kementerian Keuangan	KEMENTERIAN	11,263.11	7,092.21	62.97%
95	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	LEMBAGA	197.37	129.69	65.71%

No.	Nama Kementerian/Lembaga	Jenis K/L	Belanja Barang/Jasa	Total Pengumuman RUP	% Pengumuman RUP terhadap Belanja Pengadaan
96	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	KEMENTERIAN	211.81	146.18	69.01%

Kementerian/Lembaga dengan Persentase Pengumuman RUP 70 - 100%

No.	Nama Kementerian/Lembaga	Jenis K/L	Belanja Barang/Jasa	Total Pengumuman RUP	% Pengumuman RUP terhadap Belanja Pengadaan
97	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	LEMBAGA	508.12	362.60	71.36%
98	Kementerian Kesehatan	KEMENTERIAN	53,496.75	39,686.45	74.18%
99	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	KEMENTERIAN	199.88	155.09	77.59%
100	Badan Pemeriksa Keuangan	LEMBAGA	2,829.24	2,221.58	78.52%
101	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	KEMENTERIAN	4,301.38	3,437.17	79.91%
102	Badan Keamanan Laut	LEMBAGA	977.72	797.99	81.62%
103	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	LEMBAGA	925.78	797.05	86.10%
104	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	KEMENTERIAN	3,890.89	3,351.15	86.13%
105	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	LEMBAGA	1,057.95	950.42	89.84%
106	Badan Narkotika Nasional	LEMBAGA	1,772.09	1,625.30	91.72%
107	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	LEMBAGA	1,749.04	1,625.82	92.95%
108	Kementerian Dalam Negeri	KEMENTERIAN	3,946.36	3,733.49	94.61%

Kementerian/Lembaga dengan Persentase Pengumuman RUP > 100%

No.	Nama Kementerian/Lembaga	Jenis K/L	Belanja Barang/Jasa	Total Pengumuman RUP	% Pengumuman RUP terhadap Belanja Pengadaan
109	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LEMBAGA	100.81	100.82	100.01%
110	Mahkamah Konstitusi RI	LEMBAGA	502.00	504.72	100.54%
111	Komisi Pemberantasan Korupsi	LEMBAGA	446.73	501.75	112.32%

Sumber Data :

1. SiRUP per tanggal 17 Februari 2025 (diolah);
2. Data Belanja Pengadaan pada Kementerian/Lembaga adalah total Belanja Barang (Akun 52) dan Belanja Modal (Akun 53) yang nominalnya berdasarkan Perpres Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Akun 52 dan Akun 53; serta klarifikasi data dari Kementerian/Lembaga.

Keterangan:

1. Sumber Dana Belanja Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga: APBN, APBD, BLU, PHLN, PNPB;
2. SiRUP berdasarkan data yang tersedia dalam database dan sedang dalam proses penyesuaian dengan nomenklatur terbaru;
3. Tidak termasuk data Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kementerian/Lembaga yang ditandai dengan warna abu-abu merupakan K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, namun masih aktif di SiRUP;
5. Satuan Belanja Barang/Jasa dan Total Pengumuman RUP dalam miliar rupiah.

LAMPIRAN 2: Data Persentase Pengumuman RUP Pemerintah Daerah TA 2025 per 17 Februari 2025

Pemerintah Daerah dengan % Pengumuman RUP < 50%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
1	Provinsi Papua Pegunungan	Provinsi	1,687.19	-	0.00%
2	Provinsi Papua Barat Daya	Provinsi	1,204.08	-	0.00%
3	Kota Langsa	Kota	371.62	-	0.00%
4	Kota Subulussalam	Kota	235.42	-	0.00%
5	Kota Sungai Penuh	Kota	363.86	-	0.00%
6	Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten	518.06	-	0.00%
7	Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten	568.39	-	0.00%
8	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten	511.37	-	0.00%
9	Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten	357.78	-	0.00%
10	Kabupaten Nias Barat	Kabupaten	299.98	-	0.00%
11	Kabupaten Nias	Kabupaten	479.22	-	0.00%
12	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten	798.00	-	0.00%
13	Kabupaten Alor	Kabupaten	354.05	-	0.00%
14	Kabupaten Sumba Tengah	Kabupaten	312.80	-	0.00%
15	Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten	541.44	-	0.00%
16	Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten	384.63	-	0.00%
17	Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten	302.82	-	0.00%
18	Kabupaten Mamasa	Kabupaten	301.87	-	0.00%
19	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten	397.43	-	0.00%
20	Kabupaten Kepulauan Aru	Kabupaten	404.63	-	0.00%
21	Kabupaten Mappi	Kabupaten	646.56	-	0.00%
22	Kabupaten Puncak Jaya	Kabupaten	719.55	-	0.00%
23	Kabupaten Dogiyai	Kabupaten	624.89	-	0.00%
24	Kabupaten Kepulauan Yapen	Kabupaten	463.70	-	0.00%
25	Kabupaten Lanny Jaya	Kabupaten	845.50	-	0.00%
26	Kabupaten Mamberamo Raya	Kabupaten	631.85	-	0.00%
27	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kabupaten	483.17	-	0.00%
28	Kabupaten Paniai	Kabupaten	584.43	-	0.00%
29	Kabupaten Pegunungan Bintang	Kabupaten	784.95	-	0.00%
30	Kabupaten Puncak	Kabupaten	797.91	-	0.00%
31	Kabupaten Sarmi	Kabupaten	582.27	-	0.00%
32	Kabupaten Tolikara	Kabupaten	861.80	-	0.00%
33	Kabupaten Waropen	Kabupaten	511.62	-	0.00%
34	Kabupaten Yahukimo	Kabupaten	941.10	-	0.00%
35	Kabupaten Manokwari	Kabupaten	846.50	-	0.00%
36	Kabupaten Fak-Fak	Kabupaten	739.49	-	0.00%
37	Kabupaten Kaimana	Kabupaten	764.35	-	0.00%
38	Kabupaten Sorong	Kabupaten	787.08	-	0.00%
39	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten	344.14	-	0.00%
40	Kabupaten Teluk Bintuni	Kabupaten	2,326.52	-	0.00%
41	Kabupaten Maybrat	Kabupaten	438.84	-	0.00%
42	Kabupaten Pegunungan Arfak	Kabupaten	484.75	-	0.00%
43	Kota Padang Sidempuan	Kota	442.77	0.32	0.07%
44	Kabupaten Jayapura	Kabupaten	755.69	1.00	0.13%
45	Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten	368.36	0.58	0.16%
46	Provinsi Papua Barat	Provinsi	1,725.12	2.84	0.16%
47	Kota Tomohon	Kota	331.04	0.67	0.20%
48	Provinsi Papua Selatan	Provinsi	1,399.86	3.04	0.22%
49	Kabupaten Nduga	Kabupaten	741.90	2.20	0.30%
50	Kabupaten Karimun	Kabupaten	819.57	3.37	0.41%
51	Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten	966.19	4.20	0.43%
52	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten	543.71	2.56	0.47%
53	Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten	326.77	1.65	0.51%
54	Kabupaten Majene	Kabupaten	351.57	1.89	0.54%
55	Provinsi Papua	Provinsi	1,699.71	13.50	0.79%
56	Kabupaten Maluku Barat Daya	Kabupaten	499.08	4.25	0.85%
57	Aceh	Provinsi	5,166.21	47.04	0.91%
58	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten	527.86	5.25	0.99%
59	Kabupaten Malaka	Kabupaten	353.68	3.53	1.00%
60	Kabupaten Nabire	Kabupaten	759.88	8.83	1.16%
61	Kabupaten Takalar	Kabupaten	462.37	5.44	1.18%
62	Kota Lhokseumawe	Kota	266.91	3.42	1.28%
63	Kabupaten Kerinci	Kabupaten	392.16	5.04	1.28%
64	Kabupaten Minahasa	Kabupaten	307.89	4.27	1.39%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
65	Kabupaten Kupang	Kabupaten	706.83	11.67	1.65%
66	Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten	567.17	9.42	1.66%
67	Kabupaten Batanghari	Kabupaten	403.35	7.54	1.87%
68	Kabupaten Murung Raya	Kabupaten	1,088.47	21.63	1.99%
69	Kabupaten Bombana	Kabupaten	563.64	11.62	2.06%
70	Kabupaten Simeulue	Kabupaten	307.90	6.72	2.18%
71	Kabupaten Deiyai	Kabupaten	539.25	12.10	2.24%
72	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten	529.61	12.97	2.45%
73	Kabupaten Rote Ndao	Kabupaten	330.21	8.33	2.52%
74	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	2,027.07	51.42	2.54%
75	Kota Jayapura	Kota	740.21	18.95	2.56%
76	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten	650.18	18.71	2.88%
77	Kota Sabang	Kota	221.63	6.72	3.03%
78	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten	377.93	12.00	3.18%
79	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten	2,206.67	71.37	3.23%
80	Kota Bengkulu	Kota	609.60	20.95	3.44%
81	Kabupaten Luwu Utara	Kabupaten	464.00	16.33	3.52%
82	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi	2,127.87	77.62	3.65%
83	Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten	395.93	14.48	3.66%
84	Provinsi Maluku Utara	Provinsi	2,003.51	74.48	3.72%
85	Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten	272.58	10.17	3.73%
86	Kabupaten Muna Barat	Kabupaten	307.45	11.90	3.87%
87	Kabupaten Biak Numfor	Kabupaten	620.00	24.37	3.93%
88	Kota Manado	Kota	954.47	37.74	3.95%
89	Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten	549.87	23.54	4.28%
90	Kabupaten Merangin	Kabupaten	528.52	23.60	4.47%
91	Kabupaten Flores Timur	Kabupaten	440.00	19.74	4.49%
92	Kabupaten Sikka	Kabupaten	508.32	24.58	4.84%
93	Provinsi Papua Tengah	Provinsi	3,548.80	171.72	4.84%
94	Kabupaten Supiori	Kabupaten	425.06	21.14	4.97%
95	Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten	464.79	24.19	5.20%
96	Kota Sorong	Kota	620.13	32.86	5.30%
97	Kabupaten Kuningan	Kabupaten	960.91	52.32	5.44%
98	Kabupaten Bener Meriah	Kabupaten	348.73	20.08	5.76%
99	Kabupaten Jember	Kabupaten	1,860.17	108.68	5.84%
100	Kota Tual	Kota	267.18	15.66	5.86%
101	Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten	632.60	39.16	6.19%
102	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten	736.09	45.80	6.22%
103	Provinsi Maluku	Provinsi	1,358.97	88.99	6.55%
104	Kabupaten Karo	Kabupaten	540.63	36.44	6.74%
105	Kabupaten Tambrau	Kabupaten	622.24	41.96	6.74%
106	Kabupaten Intan Jaya	Kabupaten	682.89	49.53	7.25%
107	Kota Binjai	Kota	441.66	34.90	7.90%
108	Kabupaten Teluk Wondamah	Kabupaten	561.59	44.44	7.91%
109	Kabupaten Pulau Taliabu	Kabupaten	617.18	48.86	7.92%
110	Kabupaten Bireuen	Kabupaten	598.61	47.90	8.00%
111	Kabupaten Konawe Utara	Kabupaten	1,449.46	116.80	8.06%
112	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten	1,058.00	85.62	8.09%
113	Kota Cilegon	Kota	1,299.96	105.47	8.11%
114	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kabupaten	748.88	68.82	9.19%
115	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi	1,711.50	160.84	9.40%
116	Provinsi Lampung	Provinsi	3,538.17	338.12	9.56%
117	Kabupaten Melawi	Kabupaten	510.30	50.95	9.98%
118	Kabupaten Kampar	Kabupaten	1,475.85	149.50	10.13%
119	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kabupaten	455.16	46.53	10.22%
120	Provinsi Bengkulu	Provinsi	1,309.72	133.99	10.23%
121	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kabupaten	567.51	58.49	10.31%
122	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten	652.10	68.73	10.54%
123	Kabupaten Seram Bagian Timur	Kabupaten	303.94	32.21	10.60%
124	Kabupaten Buru Selatan	Kabupaten	335.85	35.60	10.60%
125	Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten	2,264.33	242.61	10.71%
126	Kabupaten Lahat	Kabupaten	1,358.47	148.22	10.91%
127	Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten	1,008.93	110.93	10.99%
128	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kabupaten	500.44	55.11	11.01%
129	Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten	330.01	38.12	11.55%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
130	Kota Ambon	Kota	417.15	48.88	11.72%
131	Kabupaten Halmahera Barat	Kabupaten	422.85	49.80	11.78%
132	Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi	3,265.25	391.27	11.98%
133	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten	388.47	47.58	12.25%
134	Kabupaten Simalungun	Kabupaten	1,083.10	134.51	12.42%
135	Kabupaten Manokwari Selatan	Kabupaten	510.25	63.67	12.48%
136	Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten	6,088.29	775.38	12.74%
137	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten	420.73	55.24	13.13%
138	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten	426.62	56.92	13.34%
139	Kabupaten Bima	Kabupaten	712.61	96.69	13.57%
140	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten	1,078.05	147.49	13.68%
141	Kota Pekanbaru	Kota	1,942.14	269.14	13.86%
142	Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten	570.45	79.22	13.89%
143	Kabupaten Nagekeo	Kabupaten	197.75	27.61	13.96%
144	Kabupaten Manggarai	Kabupaten	398.49	56.27	14.12%
145	Kabupaten Barito Timur	Kabupaten	509.99	73.15	14.34%
146	Provinsi Riau	Provinsi	5,167.74	745.89	14.43%
147	Kabupaten Enrekang	Kabupaten	462.83	67.56	14.60%
148	Kabupaten Asmat	Kabupaten	867.44	128.07	14.76%
149	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten	293.22	44.53	15.19%
150	Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten	421.23	64.58	15.33%
151	Kabupaten Langkat	Kabupaten	521.60	81.35	15.60%
152	Kabupaten Kuantan Singingi	Kabupaten	816.26	127.42	15.61%
153	Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten	398.32	66.21	16.62%
154	Kabupaten Donggala	Kabupaten	616.84	106.38	17.25%
155	Kabupaten Dompu	Kabupaten	501.24	86.94	17.35%
156	Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten	631.04	109.68	17.38%
157	Kabupaten Pinrang	Kabupaten	644.67	112.82	17.50%
158	Kabupaten Bantaeng	Kabupaten	481.84	85.53	17.75%
159	Kabupaten Indramayu	Kabupaten	1,551.28	275.59	17.77%
160	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten	348.09	61.92	17.79%
161	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	4,003.06	721.58	18.03%
162	Kabupaten Lembata	Kabupaten	235.31	43.43	18.46%
163	Kabupaten Wajo	Kabupaten	644.72	120.64	18.71%
164	Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten	584.31	110.69	18.94%
165	Kabupaten Banyuasin	Kabupaten	1,707.63	325.29	19.05%
166	Kabupaten Belu	Kabupaten	439.54	84.31	19.18%
167	Kabupaten Bangka	Kabupaten	577.86	112.63	19.49%
168	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten	414.11	80.94	19.55%
169	Kota Lubuk Linggau	Kota	877.50	171.66	19.56%
170	Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi	881.55	173.34	19.66%
171	Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten	765.45	151.40	19.78%
172	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten	1,317.25	265.31	20.14%
173	Kabupaten Ende	Kabupaten	412.22	84.06	20.39%
174	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten	377.00	77.05	20.44%
175	Kota Sibolga	Kota	403.49	83.19	20.62%
176	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten	1,975.75	407.48	20.62%
177	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten	459.59	95.03	20.68%
178	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten	2,649.08	549.55	20.74%
179	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten	385.54	80.55	20.89%
180	Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten	293.03	61.47	20.98%
181	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi	2,493.94	524.15	21.02%
182	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten	481.16	105.12	21.85%
183	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten	1,570.23	350.56	22.33%
184	Kabupaten MukoMuko	Kabupaten	476.45	106.47	22.35%
185	Kabupaten Poso	Kabupaten	655.53	146.88	22.41%
186	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten	525.42	118.17	22.49%
187	Kabupaten Kaur	Kabupaten	353.48	80.17	22.68%
188	Kota Kupang	Kota	574.09	131.77	22.95%
189	Kabupaten Mamuju	Kabupaten	557.31	130.07	23.34%
190	Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten	861.30	203.92	23.68%
191	Kabupaten Seram Bagian Barat	Kabupaten	395.37	93.78	23.72%
192	Kabupaten Tangerang	Kabupaten	4,041.48	958.94	23.73%
193	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kabupaten	429.97	102.13	23.75%
194	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten	615.33	146.63	23.83%
195	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kabupaten	383.35	91.51	23.87%
196	Kabupaten Boven Digoel	Kabupaten	777.91	187.24	24.07%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
197	Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten	568.21	139.94	24.63%
198	Kabupaten Lebong	Kabupaten	378.25	93.91	24.83%
199	Kabupaten Empat Lawang	Kabupaten	762.39	195.03	25.58%
200	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten	844.65	217.39	25.74%
201	Kabupaten Lamongan	Kabupaten	1,166.42	306.64	26.29%
202	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten	923.11	251.01	27.19%
203	Kabupaten Sambas	Kabupaten	1,024.70	279.26	27.25%
204	Kota Pariaman	Kota	249.63	68.44	27.42%
205	Kabupaten Luwu	Kabupaten	631.31	173.30	27.45%
206	Kabupaten Pidie	Kabupaten	734.17	201.83	27.49%
207	Kabupaten Nias Utara	Kabupaten	351.71	97.35	27.68%
208	Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	592.69	169.26	28.56%
209	Kabupaten Barito Utara	Kabupaten	1,637.28	467.99	28.58%
210	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten	621.29	179.79	28.94%
211	Kota Cirebon	Kota	749.07	217.24	29.00%
212	Kabupaten Buton	Kabupaten	341.20	99.07	29.03%
213	Kabupaten Sintang	Kabupaten	732.64	214.13	29.23%
214	Kabupaten Halmahera Timur	Kabupaten	1,046.55	307.90	29.42%
215	Kota Pagar Alam	Kota	459.10	135.46	29.50%
216	Kabupaten Mimika	Kabupaten	4,982.82	1,474.62	29.59%
217	Kota Banda Aceh	Kota	576.18	170.80	29.64%
218	Kabupaten Buru	Kabupaten	307.03	91.35	29.75%
219	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten	514.67	154.23	29.97%
220	Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten	585.99	177.41	30.27%
221	Kabupaten Agam	Kabupaten	683.05	208.04	30.46%
222	Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten	723.95	220.60	30.47%
223	Kabupaten Sanggau	Kabupaten	874.61	266.91	30.52%
224	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kabupaten	1,479.54	465.46	31.46%
225	Kabupaten Tanggamus	Kabupaten	646.47	204.39	31.62%
226	Kabupaten Majalengka	Kabupaten	1,375.45	438.56	31.88%
227	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten	779.64	250.98	32.19%
228	Kabupaten Buol	Kabupaten	412.19	133.47	32.38%
229	Kota Tebing Tinggi	Kota	334.40	108.92	32.57%
230	Kabupaten Keerom	Kabupaten	410.10	134.52	32.80%
231	Kabupaten Banggai Laut	Kabupaten	309.55	101.97	32.94%
232	Kabupaten Morowali Utara	Kabupaten	742.74	246.52	33.19%
233	Kota Samarinda	Kota	4,246.23	1,409.96	33.21%
234	Kabupaten Pesisir Barat	Kabupaten	367.18	127.27	34.66%
235	Kota Palembang	Kota	2,459.71	854.00	34.72%
236	Kabupaten Lumajang	Kabupaten	922.88	324.14	35.12%
237	Kabupaten Pesawaran	Kabupaten	465.65	163.80	35.18%
238	Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten	1,108.55	390.47	35.22%
239	Kabupaten Barru	Kabupaten	223.13	78.78	35.31%
240	Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten	501.81	178.94	35.66%
241	Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten	433.65	154.71	35.68%
242	Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten	696.03	249.49	35.85%
243	Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten	855.16	307.11	35.91%
244	Kabupaten Ciamis	Kabupaten	1,114.80	401.36	36.00%
245	Kota Ternate	Kota	562.51	204.44	36.34%
246	Kabupaten Cirebon	Kabupaten	1,251.29	454.90	36.35%
247	Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten	581.96	211.65	36.37%
248	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten	611.77	222.79	36.42%
249	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten	565.68	206.42	36.49%
250	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten	1,059.53	387.20	36.54%
251	Kabupaten Way Kanan	Kabupaten	489.60	180.91	36.95%
252	Kabupaten Soppeng	Kabupaten	343.39	126.97	36.98%
253	Kabupaten Mahakam Ulu	Kabupaten	1,947.98	721.95	37.06%
254	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten	390.33	145.06	37.16%
255	Kabupaten Malinau	Kabupaten	1,750.82	651.68	37.22%
256	Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten	685.68	255.32	37.24%
257	Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten	332.26	123.80	37.26%
258	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi	2,767.92	1,037.42	37.48%
259	Kabupaten Demak	Kabupaten	1,015.63	385.33	37.94%
260	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten	1,114.80	423.26	37.97%
261	Kabupaten Seluma	Kabupaten	409.17	157.74	38.55%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
262	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi	1,127.32	438.10	38.86%
263	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	9,508.34	3,734.75	39.28%
264	Kabupaten Pasaman	Kabupaten	385.48	151.48	39.30%
265	Kota Gunungsitoli	Kota	285.73	114.88	40.20%
266	Kabupaten Tojo Una-Una	Kabupaten	527.44	212.65	40.32%
267	Kabupaten Natuna	Kabupaten	604.59	244.20	40.39%
268	Kabupaten Ngawi	Kabupaten	1,004.97	408.03	40.60%
269	Kota Prabumulih	Kota	467.73	190.51	40.73%
270	Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten	764.61	311.84	40.78%
271	Kabupaten Ogan Ilir	Kabupaten	657.90	278.51	42.33%
272	Kota Tasikmalaya	Kota	746.96	319.35	42.75%
273	Kabupaten Muara Enim	Kabupaten	1,519.72	655.16	43.11%
274	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten	543.18	236.02	43.45%
275	Kabupaten Yalimo	Kabupaten	567.57	250.30	44.10%
276	Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten	318.82	141.34	44.33%
277	Kabupaten Tolitoli	Kabupaten	418.76	187.41	44.75%
278	Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten	1,162.81	520.57	44.77%
279	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten	3,175.18	1,428.64	44.99%
280	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten	563.25	254.90	45.25%
281	Kota Bandar Lampung	Kota	1,336.48	605.01	45.27%
282	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	1,509.44	683.46	45.28%
283	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten	1,934.28	883.75	45.69%
284	Kabupaten Samosir	Kabupaten	387.86	177.87	45.86%
285	Kota Banjar	Kota	363.37	168.66	46.42%
286	Kota Medan	Kota	5,345.06	2,497.63	46.73%
287	Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten	595.31	281.68	47.32%
288	Kota Palu	Kota	991.99	470.37	47.42%
289	Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi	1,854.02	880.52	47.49%
290	Kabupaten Subang	Kabupaten	762.38	364.79	47.85%
291	Kabupaten Pangandaran	Kabupaten	957.03	461.24	48.20%
292	Kabupaten Karawang	Kabupaten	2,610.29	1,267.73	48.57%
293	Kabupaten Seruyan	Kabupaten	681.80	331.85	48.67%
294	Provinsi Jawa Barat	Provinsi	8,981.61	4,394.12	48.92%
295	Kabupaten Dairi	Kabupaten	467.29	228.63	48.93%
296	Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten	489.53	240.91	49.21%
297	Kabupaten Bogor	Kabupaten	3,822.55	1,882.61	49.25%
298	Kabupaten Jenepono	Kabupaten	568.44	280.93	49.42%
299	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten	473.15	235.62	49.80%
300	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten	685.07	342.52	50.00%

Pemerintah Daerah dengan % Pengumuman RUP 50-70%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
301	Kabupaten Blitar	Kabupaten	1,150.36	577.13	50.17%
302	Provinsi Jambi	Provinsi	1,865.33	936.14	50.19%
303	Kota Probolinggo	Kota	308.02	155.05	50.34%
304	Kota Tarakan	Kota	531.58	268.81	50.57%
305	Kabupaten Paser	Kabupaten	2,158.01	1,094.47	50.72%
306	Kabupaten Tebo	Kabupaten	488.08	248.59	50.93%
307	Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten	691.89	353.62	51.11%
308	Kota Bima	Kota	371.94	190.80	51.30%
309	Kabupaten Sekadau	Kabupaten	278.37	143.68	51.61%
310	Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten	477.36	248.04	51.96%
311	Kabupaten Sukamara	Kabupaten	418.77	218.60	52.20%
312	Kabupaten Konawe	Kabupaten	551.44	289.83	52.56%
313	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten	372.85	197.61	53.00%
314	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten	489.75	260.65	53.22%
315	Kota Sukabumi	Kota	532.91	284.04	53.30%
316	Kota Bekasi	Kota	3,548.32	1,896.22	53.44%
317	Kabupaten Cianjur	Kabupaten	2,013.95	1,079.95	53.62%
318	Kabupaten Boalemo	Kabupaten	288.75	154.93	53.66%
319	Kabupaten Banggai	Kabupaten	1,606.72	865.41	53.86%
320	Kota Banjarbaru	Kota	893.05	484.41	54.24%
321	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten	965.72	527.07	54.58%
322	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten	300.23	164.29	54.72%
323	Kabupaten Kendal	Kabupaten	560.94	308.17	54.94%
324	Kabupaten Bulungan	Kabupaten	921.04	508.88	55.25%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
325	Kabupaten Solok	Kabupaten	467.81	260.64	55.71%
326	Kota Tanjung Pinang	Kota	400.11	225.47	56.35%
327	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kabupaten	617.89	349.18	56.51%
328	Kabupaten Situbondo	Kabupaten	934.37	528.31	56.54%
329	Kota Bukittinggi	Kota	384.96	217.73	56.56%
330	Kabupaten Buleleng	Kabupaten	854.74	485.63	56.82%
331	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten	389.64	221.39	56.82%
332	Kabupaten Lebak	Kabupaten	512.16	292.72	57.15%
333	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten	466.29	268.34	57.55%
334	Provinsi Gorontalo	Provinsi	691.11	397.76	57.55%
335	Kabupaten Lingga	Kabupaten	424.68	245.06	57.71%
336	Kota Madiun	Kota	674.88	389.53	57.72%
337	Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi	1,933.34	1,128.12	58.35%
338	Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten	827.14	483.16	58.41%
339	Kabupaten Boyolali	Kabupaten	860.17	503.88	58.58%
340	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten	240.31	140.87	58.62%
341	Kabupaten Kepulauan Talaud	Kabupaten	242.07	142.64	58.93%
342	Kabupaten Mempawah	Kabupaten	541.76	320.33	59.13%
343	Kota Balikpapan	Kota	2,976.85	1,762.11	59.19%
344	Kota Banjarmasin	Kota	1,620.71	964.68	59.52%
345	Kabupaten Wakatobi	Kabupaten	413.53	246.46	59.60%
346	Kabupaten Labuhanbatu	Kabupaten	661.18	394.68	59.69%
347	Kabupaten Gresik	Kabupaten	1,449.65	875.93	60.42%
348	Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten	486.13	294.76	60.63%
349	Kota Palangka Raya	Kota	684.61	416.94	60.90%
350	Kabupaten Berau	Kabupaten	3,439.48	2,101.05	61.09%
351	Kabupaten Bangka Barat	Kabupaten	515.73	317.76	61.61%
352	Kabupaten Merauke	Kabupaten	1,258.16	775.68	61.65%
353	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten	958.32	597.21	62.32%
354	Kabupaten Pasangkayu	Kabupaten	381.18	238.92	62.68%
355	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten	416.77	263.17	63.14%
356	Kabupaten Bekasi	Kabupaten	4,143.57	2,656.68	64.12%
357	Kabupaten Kapuas	Kabupaten	1,402.18	899.65	64.16%
358	Kota Yogyakarta	Kota	1,286.16	831.84	64.68%
359	Kabupaten Minahasa Tenggara	Kabupaten	233.02	150.86	64.74%
360	Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten	449.19	291.89	64.98%
361	Kabupaten Sumenep	Kabupaten	978.33	635.86	64.99%
362	Kota Palopo	Kota	441.55	287.13	65.03%
363	Kota Tangerang Selatan	Kota	3,040.33	1,992.82	65.55%
364	Kabupaten Sumedang	Kabupaten	1,159.94	765.31	65.98%
365	Kabupaten Bungo	Kabupaten	305.79	201.77	65.98%
366	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten	1,719.99	1,135.75	66.03%
367	Kabupaten Tegal	Kabupaten	1,264.02	835.34	66.09%
368	Kabupaten Buton Tengah	Kabupaten	330.42	218.62	66.16%
369	Kabupaten Batubara	Kabupaten	527.13	349.88	66.37%
370	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten	525.67	349.74	66.53%
371	Kabupaten Landak	Kabupaten	565.46	376.87	66.65%
372	Kabupaten Kediri	Kabupaten	1,373.52	915.62	66.66%
373	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten	270.64	181.07	66.91%
374	Kabupaten Sarolangun	Kabupaten	563.73	377.89	67.03%
375	Kabupaten Balangan	Kabupaten	1,704.12	1,146.06	67.25%
376	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten	1,611.34	1,095.86	68.01%
377	Kabupaten Magelang	Kabupaten	839.03	570.81	68.03%
378	Kota Malang	Kota	1,513.04	1,030.66	68.12%
379	Kota Surakarta	Kota	1,104.23	753.40	68.23%
380	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten	1,124.58	767.38	68.24%
381	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten	846.11	577.93	68.30%
382	Kabupaten Belitung	Kabupaten	420.67	288.22	68.51%
383	Kabupaten Mesuji	Kabupaten	570.19	393.10	68.94%
384	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten	877.51	605.18	68.97%
385	Kota Bitung	Kota	387.42	267.28	68.99%
386	Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten	654.48	451.97	69.06%
387	Kabupaten Katingan	Kabupaten	785.18	543.86	69.27%
388	Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten	999.45	694.21	69.46%
389	Kabupaten Lombok Tengah	Kabupaten	861.48	598.69	69.50%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
390	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi	3,954.07	2,753.26	69.63%
391	Kota Pasuruan	Kota	703.06	490.29	69.74%

Pemerintah Daerah dengan % Pengumuman RUP 70 - 100%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
392	Kabupaten Belitung Timur	Kabupaten	424.36	298.18	70.27%
393	Kabupaten Serang	Kabupaten	1,024.25	726.01	70.88%
394	Kota Dumai	Kota	970.91	692.85	71.36%
395	Kota Bontang	Kota	1,956.60	1,412.85	72.21%
396	Kabupaten Kolaka Utara	Kabupaten	440.53	319.71	72.57%
397	Kabupaten Bintan	Kabupaten	506.90	367.93	72.58%
398	Kota Padang	Kota	1,046.09	767.43	73.36%
399	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten	538.82	395.49	73.40%
400	Provinsi Banten	Provinsi	4,774.84	3,509.95	73.51%
401	Kota Solok	Kota	326.42	240.39	73.65%
402	Kota Makassar	Kota	3,776.89	2,782.45	73.67%
403	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	2,590.74	1,909.42	73.70%
404	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kabupaten	895.15	660.13	73.75%
405	Kabupaten Kolaka	Kabupaten	819.29	604.49	73.78%
406	Kabupaten Muaro Jambi	Kabupaten	664.85	491.66	73.95%
407	Kota Pangkal Pinang	Kota	564.57	418.83	74.19%
408	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten	634.05	472.14	74.46%
409	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi	2,811.01	2,094.98	74.53%
410	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten	1,774.86	1,332.70	75.09%
411	Kabupaten Muna	Kabupaten	359.68	270.91	75.32%
412	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten	416.10	313.48	75.34%
413	Kabupaten Rembang	Kabupaten	375.80	283.67	75.49%
414	Kota Mojokerto	Kota	622.55	476.20	76.49%
415	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten	584.04	454.84	77.88%
416	Kabupaten Nunukan	Kabupaten	1,287.54	1,004.58	78.02%
417	Kota Kotamobagu	Kota	299.34	236.74	79.09%
418	Kota Tanjung Balai	Kota	382.36	304.59	79.66%
419	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten	605.01	483.83	79.97%
420	Kabupaten Jembrana	Kabupaten	632.06	506.53	80.14%
421	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten	718.53	578.04	80.45%
422	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	479.37	386.82	80.70%
423	Kota Serang	Kota	729.65	589.52	80.79%
424	Kabupaten Morowali	Kabupaten	1,438.32	1,166.54	81.10%
425	Kota Padang Panjang	Kota	310.08	251.92	81.24%
426	Kota Tangerang	Kota	3,090.86	2,518.04	81.47%
427	Kota Depok	Kota	2,347.11	1,912.59	81.49%
428	Kota Bandung	Kota	4,413.15	3,618.84	82.00%
429	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten	857.60	706.44	82.37%
430	Kota Pontianak	Kota	1,097.82	905.87	82.51%
431	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten	359.17	296.85	82.65%
432	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten	1,186.53	981.44	82.72%
433	Kabupaten Konawe Kepulauan	Kabupaten	317.42	263.42	82.99%
434	Kota Sawahlunto	Kota	311.44	262.08	84.15%
435	Kabupaten Klaten	Kabupaten	1,128.69	960.43	85.09%
436	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten	1,150.66	982.15	85.36%
437	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kabupaten	9,264.17	7,909.16	85.37%
438	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	998.52	853.75	85.50%
439	Kabupaten Bangli	Kabupaten	492.69	421.49	85.55%
440	Kabupaten Semarang	Kabupaten	1,050.15	901.93	85.89%
441	Kabupaten Minahasa Utara	Kabupaten	390.66	336.19	86.06%
442	Kabupaten Bengkayang	Kabupaten	504.23	435.18	86.30%
443	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten	816.86	709.26	86.83%
444	Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten	1,811.21	1,572.74	86.83%
445	Kota Blitar	Kota	587.64	514.07	87.48%
446	Kabupaten Sigi	Kabupaten	520.84	463.16	88.93%
447	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kabupaten	325.37	289.50	88.97%
448	Kabupaten Banyumas	Kabupaten	1,663.40	1,488.30	89.47%
449	Kabupaten Cilacap	Kabupaten	1,035.92	930.12	89.79%
450	Kota Bogor	Kota	1,516.30	1,361.70	89.80%
451	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten	525.31	472.89	90.02%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
452	Kota Mataram	Kota	913.14	822.73	90.10%
453	Kabupaten Lamandau	Kabupaten	401.68	363.49	90.49%
454	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten	752.39	681.74	90.61%
455	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	8,359.59	7,582.15	90.70%
456	Kabupaten Maros	Kabupaten	605.08	550.36	90.96%
457	Kabupaten Kebumen	Kabupaten	986.50	902.67	91.50%
458	Kota Pare-Pare	Kota	329.84	303.18	91.92%
459	Kabupaten Bone	Kabupaten	905.92	837.33	92.43%
460	Kota Salatiga	Kota	571.24	529.25	92.65%
461	Kota Kendari	Kota	816.68	757.08	92.70%
462	Kabupaten Sleman	Kabupaten	1,521.85	1,411.28	92.73%
463	Kabupaten Pati	Kabupaten	974.86	904.47	92.78%
464	Kabupaten Karangasem	Kabupaten	673.61	627.16	93.10%
465	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten	891.93	831.11	93.18%
466	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten	816.13	761.19	93.27%
467	Kabupaten Tabanan	Kabupaten	903.76	843.49	93.33%
468	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten	495.23	462.27	93.34%
469	Kabupaten Tuban	Kabupaten	1,611.03	1,504.37	93.38%
470	Kabupaten Garut	Kabupaten	1,504.65	1,406.54	93.48%
471	Kabupaten Sragen	Kabupaten	755.85	707.07	93.55%
472	Kota Semarang	Kota	3,751.41	3,522.99	93.91%
473	Kota Metro	Kota	577.50	543.42	94.10%
474	Kabupaten Bantul	Kabupaten	1,258.67	1,185.17	94.16%
475	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten	932.30	879.76	94.36%
476	Kabupaten Bandung	Kabupaten	2,361.26	2,241.01	94.91%
477	Kota Tidore Kepulauan	Kota	572.90	545.21	95.17%
478	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten	667.22	638.17	95.65%
479	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	3,734.37	3,588.30	96.09%
480	Kabupaten Madiun	Kabupaten	737.89	713.97	96.76%
481	Kota Tegal	Kota	608.73	591.02	97.09%
482	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kabupaten	212.43	206.96	97.42%
483	Kabupaten Minahasa Selatan	Kabupaten	414.02	406.35	98.15%
484	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten	998.47	988.29	98.98%
485	Kabupaten Badung	Kabupaten	4,942.92	4,921.00	99.56%
486	Kota Bau-Bau	Kota	426.78	425.24	99.64%
487	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten	605.68	605.33	99.94%
488	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi	6,421.37	6,421.37	100.00%
489	Kota Denpasar	Kota	1,773.46	1,773.46	100.00%
490	Kabupaten Siak	Kabupaten	1,214.92	1,214.92	100.00%
491	Kabupaten Klungkung	Kabupaten	564.88	564.88	100.00%

Pemerintah Daerah dengan % Pengumuman RUP > 100%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
492	Kabupaten Pacitan	Kabupaten	586.80	590.30	100.60%
493	Kabupaten Tapin	Kabupaten	1,232.88	1,247.13	101.16%
494	Kabupaten Tabalong	Kabupaten	1,573.88	1,593.49	101.25%
495	Kabupaten Batang	Kabupaten	418.68	424.39	101.36%
496	Kota Payakumbuh	Kota	358.02	364.08	101.69%
497	Kota Pematang Siantar	Kota	452.54	460.69	101.80%
498	Kota Gorontalo	Kota	561.71	572.45	101.91%
499	Kabupaten Jombang	Kabupaten	1,092.07	1,115.42	102.14%
500	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kabupaten	944.40	970.63	102.78%
501	Kabupaten Malang	Kabupaten	1,776.23	1,828.63	102.95%
502	Kabupaten Bulukumba	Kabupaten	680.02	700.86	103.07%
503	Kota Jambi	Kota	888.59	917.51	103.26%
504	Kabupaten Kolaka Timur	Kabupaten	421.68	436.23	103.45%
505	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten	392.71	412.90	105.14%
506	Kabupaten Sampang	Kabupaten	763.32	803.51	105.27%
507	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten	491.48	517.48	105.29%
508	Kabupaten Jepara	Kabupaten	844.23	892.69	105.74%
509	Kota Surabaya	Kota	7,997.74	8,477.83	106.00%
510	Kabupaten Grobogan	Kabupaten	1,031.18	1,098.52	106.53%
511	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten	706.75	758.96	107.39%
512	Kabupaten Pemalang	Kabupaten	683.91	735.24	107.51%
513	Kota Batu	Kota	571.50	614.82	107.58%
514	Provinsi Jawa Timur	Provinsi	11,040.60	11,954.59	108.28%

No.	Nama Pemerintah Daerah	Jenis Pemerintah Daerah	Belanja Barang/Jasa	Total	% terhadap Belanja Pengadaan
515	Kabupaten Ketapang	Kabupaten	1,076.11	1,183.43	109.97%
516	Kabupaten Gowa	Kabupaten	867.58	961.42	110.82%
517	Kabupaten Magetan	Kabupaten	680.30	755.05	110.99%
518	Kota Cimahi	Kota	805.25	894.47	111.08%
519	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten	838.84	935.53	111.53%
520	Kota Singkawang	Kota	485.14	542.58	111.84%
521	Kota Magelang	Kota	462.56	519.66	112.34%
522	Kabupaten Banjar	Kabupaten	836.49	941.15	112.51%
523	Kabupaten Gianyar	Kabupaten	1,520.77	1,720.75	113.15%
524	Kabupaten Asahan	Kabupaten	680.46	776.33	114.09%
525	Kota Kediri	Kota	916.44	1,047.14	114.26%
526	Kabupaten Bangka Selatan	Kabupaten	473.11	550.21	116.30%
527	Kabupaten Brebes	Kabupaten	1,376.30	1,611.40	117.08%
528	Kabupaten Kudus	Kabupaten	930.78	1,098.43	118.01%
529	Kabupaten Blora	Kabupaten	946.90	1,119.76	118.26%
530	Provinsi Bali	Provinsi	2,079.62	2,485.04	119.49%
531	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten	555.16	670.65	120.80%
532	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten	809.21	978.14	120.88%
533	Kota Batam	Kota	1,858.35	2,248.72	121.01%
534	Kabupaten Sinjai	Kabupaten	365.33	449.52	123.04%
535	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten	348.40	430.60	123.59%
536	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	34,452.86	42,838.59	124.34%
537	Kabupaten Kotabaru	Kabupaten	1,915.26	2,394.88	125.04%
538	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten	1,641.78	2,081.88	126.81%
539	Kabupaten Purworejo	Kabupaten	737.35	957.87	129.91%
540	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten	182.34	262.26	143.83%
541	Kabupaten Pelalawan	Kabupaten	1,085.99	1,635.52	150.60%
542	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten	281.56	435.72	154.75%
543	Kabupaten Mamuju Tengah	Kabupaten	329.20	552.30	167.77%
544	Kota Pekalongan	Kota	547.34	980.03	179.06%
545	Kabupaten Ngada	Kabupaten	293.01	676.79	230.98%
546	Kabupaten Kepahiang	Kabupaten	268.04	5,347.90	1995.15%

Sumber Data :

1. SIRUP per tanggal 17 Februari 2025 (diolah);
2. Data Belanja Pengadaan berdasarkan data APBD TA 2025 pada website DJPK dengan akun 5102 dan 52; serta klarifikasi data dari Pemerintah Daerah.

Keterangan:

1. Sumber Dana Belanja Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah: APBD, APBDP, BLU, BLUD, PHLN;
2. Satuan Belanja Barang/Jasa dan Total Pengumuman RUP dalam miliar rupiah.